**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Informasi Umum**

**Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta tugas pembantuan.

Di samping tugas pokok diatas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
5. Pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

**VISI**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mempunyai Visi **”Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang produktif dan Sejahtera.”**

**MISI**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah mempunyai misi yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima.

1. Menciptakan tenaga kerja berkualitas, produktif dan berdaya saing tinggi;
2. Memperluas kesempatan kerja, berwirausaha, bertransmigrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi ketenaga kerjaan.
3. Membina/Mendorong terciptanya upah minimum yang layak serta terlaksananya peraturan perundang–undangan ketenagakerjaan untuk meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
4. Membangun kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan pembangunan daerah.
5. Meningkatkan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja dan masyarakat transmigrasi.
6. Mengembangkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi yang sejahtera untuk mendukung pembangunan daerah.
7. Meningkatkan penerapan dan penegakan hukum ketenaga kerjaan.
   1. **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2017. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

* menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
* menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
* menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
* menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
* menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
* menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

* Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
* Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali *(trace back)* pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

* 1. **Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2017 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

* Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
* Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
* Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
* Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
* Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Hibah
* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
* Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
* Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
* Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.
  1. **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas , Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2017 meliputi hal-hal berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

* 1. Informasi Umum
  2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

**BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

**BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

* 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

**BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

* 1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
  2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
  3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam

Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

**BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

* 1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
     1. Pendapatan LRA
     2. Belanja
  2. Penjelasan Neraca
     1. Aset
     2. Kewajiban
     3. Ekuitas Dana
  3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
     1. Pendapatan LO
     2. Beban
  4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
  5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

**BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

**BAB VII. PENUTUP**

**BAB II**

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN**

**DAN PENCAPAIAN TARGET APBD**

* 1. **Ekonomi Makro**

Sesuai dengan tugas pokok dalam penyelenggaraan urusan kepemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di wilayah provinsi Sumatera Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar diharapkan mampu menyediakan tenaga kerja terampil dan berdaya saing tinggi dan memberikan perlindungan normatif terhadap tenaga kerja serta pemberdayaan kawasan untuk program transmigrasi. Untuk itu langkah-langkah yang perlu diambil adalah :

* Meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing tenaga kerja untuk menembus pasar kerja dalam dan luar negeri .
* Meningkatkan jumlah kesempatan kerja dan berwirausaha .
* Mengurangi kasus perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja .
* Mempercepat perwujudan pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi guna membuka peluang berusaha dan kesempatan kerja.

Disamping tugas sebagaimana telah dijelaskan diatas yang pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah di bidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian di provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan Tugas Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan di sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi mempunyai cakupan yang luas dalam mewujudkan Tenaga Kerja Sejahtera dan pemberdayaan Kawasan Pemukiman Transmigrasi dalam rangka memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup transmigran serta masyarakat sekitarnya.

* 1. **Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan dalam pembelanjaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2017. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja agar proses pencairan dana selama tahun anggaran 2017 sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA tahun anggaran 2017 meliputi hal berikut :

* + 1. **Kebijakan Peningkatan Pendapatan**

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2017 digariskan sebagai berikut :

* Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah.
* Peningkatan penerimaan retribusi daerah.
  + 1. **Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan dibidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

* Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
* Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.
  1. **Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 adalah :

* + - 1. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran untuk kepentingan dinas yang merupakan target capaian dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Pelayanan Administrasi ini didukung oleh 11 kegiatan yang terdiri dari :
* Tersedianya bahan serta perlengkapan untuk mendukung pelayanan administrasi surat menyurat sesuai dengan target kegiatan penyediaan jasa surat menyurat selama satu tahun.
* Terlaksananya layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai target kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun.
* Terwujudnya lingkungan kantor yang aman, nyaman dan bersih sesuai target kegiatan penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor selama satu tahun.
* Tersedianya alat tulis kantor guna memperlancar pelayanan administrasi perkantoran sesuai target kegiatan penyediaan alat tulis kantor selama satu tahun.
* Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun sesuai target kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
* Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan kantor sesuai target kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun.
* Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan agar informasi dapat diterima pegawai dengan cepat sesuai target kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama satu tahun.
* Terpenuhinya kebutuhan konsumsi makan dan minum rapat dinas sesuai target kegiatan penyediaan makanan dan minuman selama satu tahun.
* Terwujudnya persamaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatan pelayanan dan pertanggung jawaban sesuai target kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.
* Tersedianya jasa informasi, dokumentasi dan publikasi perkantoran sesuai target penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi perkantoran selama satu tahun.
* Terlaksananya pembinaan mental dan fisik aparatur sehingga meningkatnya kesehatan fisik dan mental aparatur sesuai target kegiatan penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur selama satu tahun.
  + - 1. Tercapainya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur sesuai target capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini didukung dengan 6 kegiatan yang terdiri dari :
* Terlaksananya pengadaan 11 lemari arsip, 6 buah filling kabinet, 3 buah infokus dan 1 unit kulkas selama 1 tahun sesuai target kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
* Terlaksananya pemeliharaan rutin atap/loteng, pintu, jendela, aula dinas dan pengecatan pagar dan perbaikan pintu paga dinas serta pemeliharaan listrik, air, internet dan pada UPTD BLK Padang Panjang dan UPTD BLK Payakumbuh berupa pemeliharaan atap loteng, pengecatan pagar, jaringan listrik, air dan pemeliharaan kantor UPTD Balai Hyperkes sesuai target kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama satu tahun.
* Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas sesuai target kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda empat.
* Terlaksananya pemeliharaan meubeler selama satu tahun sesuai target kegiatan pemeliharaan rutin/berkala meubeler.
* Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun sesuai target kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
* Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rasuna Said dan halaman kantor Dinas sesuai dengan target kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
  + - 1. Meningkatnya disiplin aparatur sesuai target capaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program ini didukung oleh kegiatan :
* Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya sebanyak 269 stell bagi PNS dalam rangka peningkatan disiplin aparatur sesuai target kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
  + - 1. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sesuai target capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program ini didukung oleh kegiatan :
* Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 melalui pemberian kontribusi keikutsertaan 371 orang untuk mengikuti bimbingan teknis sehingga dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas PNS sesuai target peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
  + - 1. Meningkatnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini didukung dengan 2 kegiatan yang terdiri dari :
* Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD berupa laporan penataan keuangan sesuai target penyusunan laporan selama 1 tahun.
* Terlaksananya penatausahaan keuangan OPD sesuai target pelaksanaan penatausahaan keuangan.
  + - 1. Meningkatnya Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset. Program ini didukung dengan 3 kegiatan yang terdiri dari :
* Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD berupa penyusunan RKT, Renja, DPA Tahun 2017 dan RKPD sesuai target penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
* Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan OPD sesuai ketentuan yang berlaku sesuai target monitoring dan evaluasi program dan kegiatan OPD.
* Terlaksananya pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian aset Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sesuai target pendataan.
  + - 1. Meningkatnya keterampilan, keahlian dan kompetensi serta produktivitas tenaga kerja sesuai target capaian Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini didukung dengan 10 kegiatan yang terdiri dari :
* Terlatihnya 408 orang tenaga kerja menjadi tenaga kerja yang terampil dan produktif jurusan menjahit, montir sepeda motor, service handphone,pertukangan, bangunan batu dan beton dan las 6 G pada UPTD BLK Padang Panjang dan 372 orang tenaga kerja terampil jurusan menjahit, mekanik mesin ringan, tata boga dan service HP pada UPTD BLK Payakumbuh sesuai kebutuhan pasar kerja sesuai target kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan.
* Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi 100 orang masyarakat dan pelaku UKM sesuai target kegiatan pelatihan kewirausahaan mandiri (PKM).
* Terlaksananya seleksi nasional (Pusat) peserta pemagangan ke Jepang yang di tempatkan di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 200 orang sesuai target pemagangan ke Jepang.
* Terselenggaranya akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) sebanyak 15 lembaga pelatihan kerja swasta sesuai target pelaksananaan kegiatan akreditasi LPKS.
* Terlaksananya pelatihan pemagangan dalam negeri untuk 32 orang sesuai dengan target pelatihan pemagangan dalam negeri.
* Terlaksananya identifikasi kebutuhan pelatihan dalam negeri untuk 4 perusahaan sehingga teridentifikasinya kebutuhan pasar kerja dalam negeri.
* Terlaksananya pelatihan motivasi berprestasi Bagi 50 orang usaha produktiv untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan UKM.
* Terlaksananya pendataan lembaga pelatihan kerja terhadap 150 LPK sehingga tersedianya data yang akurat tentang kegiatan lembaga pelatihan kerja.
* Terlaksananya uji sertifikasi kompefensi metodologi pelatihan terhadap 60 orang sesuai target sehingga meningkatnya kualitas lulusan pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja.
* Terlaksananya pelatihan soft skill instruktur terhadap 30 orang guna meningkatkan sikap mental isntruktur seuai dengan target pelatihan soft skill instruktur.
  + - 1. Terjadinya penurunan tingkat pengangguran terbuka dan setengah terbuka yang merupakan sasaran dari Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha. Program ini didukung dengan 14 kegiatan yang terdiri dari :
* Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data informasi pasar kerja di 18 Kab/Kota sehingga terpenuhinya lowongan kerja dalam daerah.
* Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sehingga tersedianya informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang akurat.
* Terlaksananya sosialisasi program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam / luar negeri terhadap 200 orang.
* Terbentuknya kelompok usaha masyarakat yang mandiri melalui program Grameen Bank guna mengurangi penggngguran melalui perluasan kesempatan kerja sektor informal dan terbentuk serta terbinanya anggota kelompok usaha yang mandiri.
* Terlaksananya penyuluhan 1500 orang calon pencari kerja sehingga tersedianya calon pencari kerja yang mengetahui minat, bakat dan kemampuan di dalam memasuki dunia kerja.
* Terlaksananya pameran bursa kerja (job-fair) terhadap 35 perusahaan dimana tersedianya perusahaan pengguna tenaga kerja yang menawarkan lowongan kerja dan bertemunya perusahaan dengan calon pencari kerja guna memperoleh penempatan tenaga kerja.
* Terlaksananya perluasan kesempatan kerja melalui teknologi tepat guna (TTG) yang di lakukan terhadap 40 orang agar terciptanya usaha pemula yang mandiri pasca TTG.
* Terlaksananya sosialisasi peraturan di perusahaan tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) di perusahaan sehingga perusahaan pengguna TKA dapat menguasai mekanisme / tata cara penggunaan tenaga kerja asing dan terbinanya perusahaan pengguna TKA.
* Terlaksananya identifikasi terhadap 14 Kab/Kota lokasi wilayah padat karya guna mengurangi pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja sektor informal sesuai dengan taget identifikasi daerah potensi padat karya.
* Terlaksananya bimbingan teknis pelaksana dan pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) sehingga tersedianya pelaksana BKK yang menguasai dan bisa melakukan mekanisme antar kerja dilembaganya guna membantu pengurangan pengangguran serta terbinanya BKK yang sudah terbentuk.
* Terlaksananya bimbingan teknis petugas pengumpul dan pengolah informasi pasar kerja yang dilakukan terhadap 30 orang petugas pelaporan IPK sesuai target bimbingan.
* Terlaksananya pembinaan 50 orang calon TKI Pra- pemberangkatan guna terbinanya calon TKI pemberangkatan ke luar negeri sesuai target pembinaan dalam pasca penempatan TKI sehingga para TKI mengerti akan hak dan kewajibannya.
* Terlaksananya kegiatan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja swasta dengan 80 lembaga petugas pelaksana LPTKS dan PPTKIS sesuai target kegiatan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (LPTKIS).
* Terlaksananya monitoring dan orientasi Pra-Pemberangkatan tenaga kerja AKAD terhadap 50 orang guna mengurangi pengangguran dalam negeri dan meminimalisir permasalahan tenaga kerja.
  + - 1. Terwujudnya suasana hubungan kerja yang harmonis antara pelaku produksi yang merupakan target capaian Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Program ini didukung dengan 5 kegiatan yang terdiri dari :
* Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial (HI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) guna meningkatkan pemahaman pengusaha dan pekerja tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial (HI) dan Jaminan Sosial.
* Terlaksananya pembinaan BPJS Ketenagakerjaan di 42 perusahaan agar perlindungan sosial terhadap pengusaha dan tenaga kerja di perusahaan dapat di lakukan.
* Terlaksananya pembinaan terhadap 35 perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sehingga meningkatnya pemahaman mekanisme penyediaan pekerja/buruh bagi perusahaan pemberi kerja.
* Terlaksananya pembinaan dan pembentukan Dewan Pengupahan Kab/Kota terhadap 30 perusahaan agar Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi bagi pengusaha dan pekerja sesuai target pembinaan dan pembentukan Dewan Pengupahan Kab/Kota dan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).
* Terlaksananya pembinaan dan monitoring terhadap 35 perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sehingga pembayaran upah pekerja berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.
  + - 1. Terciptanya program perlindungan tenaga kerja dan sistem pengawasan tenaga kerja Program ini didukung oleh 7 kegiatan yang terdiri dari :
* Terlaksananya pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan terhadap 60 perusahaan Kabupaten/Kota, agar semua hak dan kewajiban tenaga kerja dapat terpenuhi.
* Terlaksananya pembinaan terhadap 33 perusahaan agar pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dapat terealisasi dengan baik sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan kerja.
* Terlaksananya identifikasi kecelakan kerja di 40 perusahaan Kabupaten/Kota sesuai dengan target identifikasi kecelakaan kerja di perusahaan Kab/Kota.
* Terlaksananya pra-akreditasi laboratorium pada laboratorium UPTD Balai Hiperkes.
* Terlaksananya pemeriksaaan kesehatan kerja perusahaan dengan 1500 sampel karyawan/tenaga kerja yang bekerja di UMKM demi perlindungan tenaga kerja seutuhnya.
* Terlaksananya pengujian lingkungan kerja dengan 1.156 sampel di lingkungan perusahaan sehingga meningkatnya kualitas lingkungan kerja dan kesehatan tenaga kerja di lingkungan UMKM.
* Terlaksananya In House Training penggunaan peralatan K3 terhadap 20 orang peserta agar para peserta dapat menggunakan peralatan K3 dengan tepat dan baik.
  + - 1. Terciptanya program percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus daerah tertinggal. Program ini didukung oleh 3 kegiatan yang terdiri dari :
* Terlaksananya pelatihan keterampilan terhapad 120 orang warga transmigrasi di unit pemukiman (pelatihan bahan bangunan, biocyclo farming, dan pelatihan teknis pembibitan kelapa sawit).
* Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi pada tahap pemantapan terhadap 2 kawasan transmigrasi sehingga usaha ekonominya dapat ditingkatkan.
* Terlaksananya pengembangan sosial budaya pada tahap pemantapan terhadap 2 kawasan sehingga layanan sosial budayanya dapat ditingkatkan sesuai dengan target pengembangan usaha ekonomi pada tahap pemantapan.
  + - 1. Terciptanya program peningkatan pendapatan daerah. Program ini didukung oleh kegiatan :
* Terciptanya intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi untuk meningkatkan pemasukan keuangan daerah dari 40 perusahaan atau Badan Usaha Daerah di Provinsi Sumatera Barat.

.

**BAB III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

* 1. **Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Dalam Tahun Anggaran 2017, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp. 458.500.000,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan Belanja daerah untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sejumlah Rp. 38.180.419.729,- direncanakan untuk membiayai :

* Belanja Pegawai Rp. 20.661.190.312,-
* Belanja Barang dan Jasa Rp. 16.842.053.017,-
* Belanja Modal senilai Rp. 677.176.400,-

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

* + 1. **Pendapatan**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017 diperoleh realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 461.892.091,-.

Secara rinci capaian perolehan pendapatan 2017 jika dibanding dengan anggaran tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendapatan Tahun 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **PENDAPATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** | **Lebih/Kurang** |
| I | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 458.500.000,- | 461.892.091,- | 100,74 | 3.392.091,- |
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 458.500.000,- | 461.892.091,- | 100,74 | 3.392.091,- |
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| 4 | Lain-lain PAD yang Syah | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |

Pada tabel di atas terlihat bahwa untuk tahun 2017 pendapatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencapai target anggaran, yaitu dari dianggarkan sebesar Rp. 458.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 461.892.091,- atau sebesar 100,74 % dari yang dianggarkan.

* + 1. **Belanja Daerah**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **URAIAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** | **LEBIH/KURANG** |
| B | BELANJA | 38.180.419.729,- | 36.101.653.019,- | 94,56 | 2.078.766.710,- |
| I | BELANJA OPERASI | 37.503.243.329,- | 35.437.652.019,- | 94,49 | 2.065.591.310,- |
| 1 | Belanja Pegawai | 20.661.190.312,- | 19.595.326.386,- | 94,84 | 1.065.863.926,- |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.842.053.017,- | 15.842.325.633,- | 94,06 | 999.727.384,- |
|  |  |  |  |  |  |
| II | BELANJA MODAL | 677.176.400,- | 664.001.000,- | 98,05 | 13.175.400,- |
| 1 | Belanja Tanah | 0,- |  |  |  |
| 2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 343.141.000,- | 333.380.000,- | 97,16 | 9.761.000,- |
| 3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 334.035.400,- | 330.621.000,- | 98,98 | 3.414.400,- |
| 4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| 5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |

Seluruh realisasi belanja tahun 2017 adalah Rp. 36.101.653.019,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 38.180.419.729,- atau terealisasi sebesar 94,56 % dari anggaran belanja tahun 2017.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 adalah :

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 20.661.190.312,- yang terealisasi sebesar Rp. 19.595.326.386,- dan bersisa Rp. 1.065.863.926,- atau sebesar 94,84% dari pagu anggaran. Belanja tidak langsung ini terdiri dari :

* Gaji dan Tunjangan yang dianggarkan sebesar Rp. 15.759.485.927,- terealisasi sebesar Rp. 14.944.380.937,- dan bersisa Rp. 815.104.990,- atau sebesar 94,83% dari yang dianggarkan.
* Tambahan Penghasilan PNS yang dianggarkan sebesar Rp. 4.887.949.385,- terealisasi sebesar Rp. 4.637.190.449,- dan bersisa Rp. 250.758.936,- atau sebesar 94,87% dari yang dianggarkan.
* Insentif Pemungutan Retribusi yang dianggarkan sebesar Rp. 13.755.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.755.000,- dan bersisa Rp. 0,- atau sebesar 100% dari yang dianggarkan.

Belanja Langsung pada tahun anggaran 2017 ini dianggarkan sebesar Rp. 17.519.229.417,- yang terdiri dari 12 Program didukung 66 kegiatan, terealisasi sebesar Rp. 16.506.326.633,- dan bersisa Rp. 1.012.902.784,- atau sebesar 94,22% dari yang dianggarkan.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dianggarkan sebesar Rp. 2.568.027.380,- terealisasi sebesar Rp. 2.396.756.983,- dan bersisa Rp. 171.270.397,- atau sebesar 93,33% dari yang dianggarkan. Program Pelayanan Administrasi ini didukung oleh 11 kegiatan yang terdiri dari :

* Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dianggarkan sebesar Rp. 98.715.380,- terealisasi sebesar Rp. 82.589.700,- dan bersisa Rp. 16.125.680,- atau sebesar 83,66% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dianggarkan sebesar Rp. 510.079.500,- terealisasi sebesar Rp. 463.017.108,- dan bersisa sebesar Rp. 47.062.392,- atau sebesar 90,77% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 949.359.000,- terealisasi Rp. 899.314.657,- dan bersisa Rp. 50.044.343,- atau sebesar 94,73% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 102.717.750,- terealisasi sebesar Rp. 102.034.550,- dan bersisa Rp. 683.200,- atau sebesar 99,33% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dianggarkan sebesar Rp. 66.930.750,- terealisasi sebesar Rp. 62.975.600,- dan bersisa Rp. 3.955.150,- atau sebesar 94,09% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 23.381.750,- terealisasi sebesar Rp. 23.362.575,- dan bersisa Rp 19.175,- atau sebesar 99,92% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp. 26.928.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.035.000,- dan bersisa Rp. 2.893.000,- atau sebesar 89,26% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dianggarkan sebesar Rp. 76.271.250,- terealisasi sebesar Rp. 72.233.000,- dan bersisa Rp. 4.038.250,- atau sebesar 94,71% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 563.240.375,- terealisasi sebesar Rp. 534.192.711,- dan bersisa Rp. 29.047.664,- atau sebesar 94,84% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Penyediaan Jasa informasi, dokumentasi dan publikasi yang dianggarkan sebesar Rp. 131.403.625,- terealisasi Rp. 115.352.082,- dan bersisa Rp. 16.051.543,- atau sebesar 87,78% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Penyediaan Jasa pembinaan mental dan fisik aparatur dianggarkan sebesar Rp. 19.000.000,- terealisasi Rp. 17.650.000,- dan bersisa Rp. 1.350.000,- atau sebesar 92,89% dari yang dianggarkan.
  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.277.905.900,- terealisasi sebesar Rp 1.198.792.736,- dan bersisa Rp. 79.113.164,- atau sebesar 93,81% dari yang dianggarkan. Program ini didukung dengan 6 kegiatan yang terdiri dari :
* Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 343.141.000,- terealisasi sebesar Rp. 333.380.000,- dan bersisa Rp. 9.761.000,- atau sebesar 97,16% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 227.898.000,- terealisasi sebesar Rp. 220.643.500,- dan bersisa Rp. 7.254.500,- Atau sebesar 96,82% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang dianggarkan Rp. 232.257.000,- terealisasi sebesar Rp. 192.911.186,- dan bersisa Rp. 39.345.814,- atau sebesar 83,06% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur yang dianggarkan sebesar Rp. 29.199.500,- terealisasi Rp. 27.680.000,- dan bersisa Rp. 1.519.500,- atau sebesar 94,80% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 111.375.000,- terealisasi sebesar Rp. 93.557.050,- dan bersisa Rp. 17.817.950,- atau sebesar 84,00% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 334.035.400,- terealisasi sebesar Rp. 330.621.000,- dan bersisa Rp. 3.414.400,- atau sebesar 98,98% dari yang dianggarkan.

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang dianggarkan sebesar Rp. 190.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 186.300.000,- dan bersisa Rp. 4.100.000,- atau sebesar 97,85% dari yang dianggarkan. Program ini didukung dengan kegiatan, yaitu :

* Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya yang dianggarkan sebesar Rp. 190.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 186.300.000,- dan bersisa Rp. 4.100.000,- atau sebesar 97,85% dari yang dianggarkan.

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dianggarkan sebesar Rp 48.625.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.560.000,- dan bersisa Rp. 9.065.000,- atau sebesar 81,36% dari yang dianggarkan. Program ini didukung oleh kegiatan :

* Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp. 48.625.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.560.000,- dan bersisa Rp. 9.065.000,- atau sebesar 81,36% dari yang dianggarkan.

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp. 644.512.929,- terealisasi sebesar Rp. 617.319.175,- dan bersisa Rp. 27.193.754,- atau sebesar 95,78% dari yang dianggarkan. Program ini terdiri dari 2 kegiatan.

* Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang dianggarkan sebesar Rp. 249.995.000,- terealisasi sebesar Rp. 247.926.625,- dan bersisa Rp. 2.068.375,- atau sebesar 99,17% dari yang dianggarkan dikarenakan adanya sisa honor petugas verifikasi Laporan Capaian kinerja.
* Kegiatan Penatausahaan Keuangan OPD yang dianggarkan Rp. 394.517.929,- terealisasi sebesar Rp. 369.392.550,- dan bersisa Rp. 25.125.379,- atau sebesar 93,63% dari yang dianggarkan.

1. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset yang dianggarkan sebesar Rp. 375.904.250,- terealisasi sebesar Rp. 336.779.627,- dan bersisa Rp. 39.124.623,- atau sebesar 89,59% dari yang dianggarkan. Program ini didukung dengan 3 kegiatan yang terdiri dari :

* Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD yang dianggarkan sebesar Rp. 155.665.000,- terealisasi sebesar Rp. 152.908.348,- dan bersisa Rp. 2.756.652,- atau sebesar 98,23% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD yang dianggarkan sebesar Rp. 71.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 67.740.179,- dan bersisa Rp. 3.259.821,-atau sebesar 95,41% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD yang dianggarkan sebesar Rp. 149.239.250,- terealisasi sebesar Rp. 116.131.100,- dan bersisa Rp. 33.108.150,- atau sebesar 77,82% dari yang dianggarkan.

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang dianggarkan sebesar Rp. 8.893.173.721,- terealisasi sebesar Rp. 8.331.966.757,- dan bersisa Rp 561.206.964,- atau sebesar 93,69% dari yang dianggarkan. Program ini didukung dengan 11 kegiatan yang terdiri dari :

* Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Panjang yang dianggarkan sebesar Rp. 3.641.290.873,- terealisasi sebesar Rp. 3.357.247.210,- dan bersisa Rp. 284.043.663,- atau sebesar 92,20% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Payakumbuh yang dianggarkan sebesar Rp. 3.550.880.993,- terealisasi sebesar Rp. 3.346.683.448,- dan bersisa Rp. 204.197.545,- atau sebesar 94,25% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Mandiri (PKM) yang dianggarkan sebesar Rp. 238.774.000,- terealisasi sebesar Rp. 234.795.050,- dan bersisa Rp. 3.978.950,- atau sebesar 98,33% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Seleksi Calon Peserta Magang ke Jepang yang dianggarkan sebesar Rp. 325.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 308.976.770,- dan bersisa Rp. 16.023.230,- atau sebesar 95,07% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Akreditasi Program Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dianggarkan sebesar Rp. 124.564.000,- terealisasi sebesar Rp. 115.116.450,- dan bersisa Rp. 9.447.550,- atau sebesar 92,42% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri yang dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 144.212.450,- dan bersisa Rp. 5.787.550,- atau sebesar 96,14% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Dalam Negeri yang dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.306.800,- dan bersisa Rp. 693.200,- atau sebesar 98,61% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pelatihan Motivasi Berprestasi bagi Usaha Produktif yang dianggarkan sebesar Rp. 322.845.000,- terealisasi sebesar Rp. 310.534.150,- dan bersisa Rp. 12.310.850,- atau sebesar 96,19% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pendataan Lembaga Pelatihan Kerja yang dianggarkan sebesar Rp. 65.065.000,- terealisasi sebesar Rp. 60.980.800,- dan bersisa Rp. 4.084.200,- atau sebesar 93,72% dari yang dianggarkan karena.
* Kegiatan Uji Sertifikasi Kompefensi Metodologi Pelatihan yang dianggarkan sebesar Rp. 357.755.855,- terealisasi sebesar Rp. 341.883.429,- dan bersisa Rp. 15.872.426,- atau sebesar 95,56% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pelatihan Soft Skill Instruktur yang dianggarkan sebesar Rp. 66.998.000,- terealisasi sebesar Rp. 62.230.200,- dan bersisa Rp. 4.767.800,- atau sebesar 92,88% dari yang dianggarkan.

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha yang dianggarkan sebesar Rp. 1.227.472.137,- terealisasi sebesar Rp. 1.195.285.143,- dan bersisa Rp. 32.186.994,- atau sebesar 97,38% dari yang dianggarkan. Program ini didukung dengan 14 kegiatan yang terdiri dari :

* Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) yang dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 38.177.050,- dan bersisa Rp. 1.822.950,- atau sebesar 95,44% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 44.258.100,- dan bersisa Rp. 5.741.900,- atau sebesar 88,52% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Sosialisasi Program Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Negeri/Luar Negeri yang dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 79.270.000,- dan bersisa Rp. dan 730.000,- atau sebesar 99,09% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Program Grameen Bank yang dianggarkan sebesar Rp. 17.210.600,- terealisasi sebesar Rp. 17.210.600,- dan bersisa Rp. 0,- atau sebesar 100% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Kepada Calon Pencari Kerja yang dianggarkan sebesar Rp. 85.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 84.444.300,- dan bersisa Rp. 555.700,- atau sebesar 99,35% dari yang dianggarkan karena.
* Kegiatan Pameran Bursa Kerja (Job Fair) yang dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 198.066.000,- dan bersisa Rp. 1.934.000,- atau sebesar 99,03% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dianggarkan sebesar Rp. 237.937.537,- terealisasi sebesar Rp. 234.441.550,- dan bersisa Rp. 3.495.987,- atau sebesar 98,53% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Sosialisasi Peraturan di Perusahaan Tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) di Perusahaan yang dianggarkan sebesar Rp. 70.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 68.194.650,- dan bersisa Rp. 1.805.350,- atau sebesar 97,42% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Identifikasi Lokasi Wilayah Padat Karya yang dianggarkan sebesar Rp. 44.324.000,- terealisasi sebesar Rp. 42.937.400,- dan bersisa Rp. 1.386.600,- atau sebesar 96,87% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksana Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 74.377.700,- dan bersisa Rp. 622.300,- atau sebesar 99,17% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Pengumpul dan Pengolah Informasi Pasar Kerja yang dianggarkan sebesar Rp. 48.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 40.198.000,- dan bersisa Rp. 7.802.000,- atau sebesar 83,75% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pembinaan Calon TKI Pra-Pemberangkatan yang dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 97.995.958,- dan bersisa Rp. 2.004.042,- atau sebesar 98,00% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS) yang dianggarkan sebesar Rp. 110.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 105.805.335,- dan bersisa Rp. 4.194.665,- atau sebesar 96,19% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Monitoring dan Orientasi Pra Pemberangkatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang dianggarkan sebesar Rp. 70.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 69.908.500,- dan bersisa Rp. 91.500,- atau sebesar 99,87% dari yang dianggarkan.

1. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan yang dianggarkan sebesar Rp. 434.556.500,- terealisasi sebesar Rp. 411.471.250,- dan bersisa Rp. 23.085.250,- atau sebesar 94,69% dari yang dianggarkan. Program ini didukung dengan 5 kegiatan :

* Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketengakerjaan Bidang Hubungan Industrial (HI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) yang dianggarkan Rp. 96.936.500,- terealisasi sebesar Rp. 95.362.000,- dan bersisa Rp. 1.574.500,- atau sebesar 98,38% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pembinaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketengakerjaan yang dianggarkan Rp. 96.973.000,- terealisasi sebesar Rp. 89.428.450,- dan bersisa Rp. 7.544.550,- atau sebesar 92,22% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pembinaan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang dianggarkan sebesar Rp. 82.691.000,- terealisasi sebesar Rp. 82.619.550,- dan bersisa Rp. 71.450,- atau sebesar 99,91% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan Dewan Pengupahan Kab/Kota dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dianggarkan sebesar Rp. 100.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 93.676.000,- dan bersisa Rp. 6.724.000,- atau sebesar 93,30% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang dianggarkan sebesar Rp. 57.556.000,- terealisasi sebesar Rp. 50.385.250,- dan bersisa Rp. 7.170.750,- atau sebesar 87,54% dari yang dianggarkan.

1. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja yang dianggarkan Rp. 1.102.747.400,- terealisasi sebesar Rp. 1.048.826.433,-dan bersisa Rp. 53.920.967,- atau sebesar 95,11% dari yang dianggarkan. Program ini terdiri dari 7 kegiatan, yaitu :

* Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Per Undang-undangan Ketenagakerjaan ke Perusahaan di Kabupaten/Kota yang dianggarkan Rp. 187.367.150,- terealisasi sebesar Rp. 175.956.700,- dan bersisa Rp 11.410.450,- atau sebesar 93,91% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ke Perusahaan yang dianggarkan sebesar Rp. 251.037.500,- terealisasi sebesar Rp. 242.365.350,- dan bersisa Rp. 8.672.150,- atau sebesar 96,55% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Identifikasi Kecelakaan Kerja di Perusahaan Kabupaten/Kota yang dianggarkan sebesar Rp. 137.336.500,- terealisasi sebesar Rp. 132.251.250,- dan bersisa Rp. 5.085.250,- atau sebesar 96,30% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pra Akreditasi Laboratorium yang dianggarkan sebesar Rp. 148.292.150,- terealisasi sebesar Rp. 135.896.301,- dan bersisa Rp. 12.395.849,- atau sebesar 91,64% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Kerja yang dianggarkan sebesar Rp. 149.130.100,- terealisasi sebesar Rp. 143.858.659,- dan bersisa Rp. 5.271.441,- atau sebesar 96,47% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pengujian lingkungan Kerja yang dianggarkan sebesar Rp. 149.784.000,- terealisasi sebesar Rp. 144.061.950,- dan bersisa Rp. 5.722.050,- atau sebesar 96,18% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan In House Training Penggunaan Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dianggarkan sebesar Rp. 79.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 74.436.223,- dan bersisa Rp. 5.363.777,- atau sebesar 93,28% dari yang dianggarkan.

1. Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal yang dianggarkan sebesar Rp. 604.302.200,- terealisasi sebesar Rp. 591.666.529,- dan bersisa 12.635.671,- atau sebesar 97,91% dari yang dianggarkan. Program ini terdiri dari 4 kegiatan, yaitu:

* Kegiatan Pelatihan Keterampilan Warga Transmigrasi yang dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 493.024.750,- dan bersisa Rp. 6.975.250,- atau sebesar 98,60% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Pada Tahap Pemantapan yang dianggarkan sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- dan bersisa Rp. 0,- atau sebesar 0% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pengembangan Sosial Budaya Pada Tahap Pemantapan yang dianggarkan sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- dan bersisa Rp. 0,- atau sebesar 0% dari yang dianggarkan.
* Kegiatan Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmgrasi yang dianggarkan sebesar Rp. 104.302.200,- terealisasi sebesar Rp. 98.641.779,- dan bersisa Rp. 5.660.421,- atau sebesar 94,57% dari yang dianggarkan.

1. Program Peningkatan Pendapatan Daerah yang dianggarkan Rp. 151.602.000,- terealisasi sebesar Rp. 151.602.000,- dan bersisa Rp. 0,- atau sebesar 100% dari yang dianggarkan. Program ini terdiri dari :

* Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi yang dianggarkan sebesar Rp. 151.602.000,- terealisasi sebesar Rp. 151.602.000,- dan bersisa Rp. 0,- atau sebesar 100% dari yang dianggarkan.
  1. **Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.**

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses perubahan yang memakan waktu cukup lama dan mendekati akhir tahun. Disamping itu konfersi premium ke pertamak sesuai dengan ketentuan baru yang perlunya pemahaman dan pembelajaran lebih lanjut dari setiap unsur yang terlibat dalam proses keuangan daerah juga menjadi kendala dalam merealisasikan anggaran tahun 2017 serta beberapa kegiatan yang pencapaiannya kurang dari 90%. Hal ini bukan disebabkan karena kendala khusus namun lebih disebabkan karena effisiensi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

* Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dianggarkan sebesar Rp. 98.715.380,- terealisasi sebesar Rp. 82.589.700,- dan bersisa Rp. 16.125.680,- atau sebesar 83,66% dari yang dianggarkan karena efisiensi pemakaian BBM.
* Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp. 26.928.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.035.000,- dan bersisa Rp. 2.893.000,- atau sebesar 89,26% dari yang dianggarkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan kantor.
* Kegiatan Penyediaan Jasa informasi, dokumentasi dan publikasi yang dianggarkan sebesar Rp. 131.403.625,- terealisasi Rp. 115.352.082,- dan bersisa Rp. 16.051.543,- atau sebesar 87,78% dari yang dianggarkan karena efisiensi pemakaian BBM.
* Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang dianggarkan Rp. 232.257.000,- terealisasi sebesar Rp. 192.911.186,- dan bersisa Rp. 39.345.814,- atau sebesar 83,06% dari yang dianggarkan karena karena kondisi kendaraan operasional masih bagus, sehingga dana yang dianggarkan masih berlebih.
* Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 111.375.000,- terealisasi sebesar Rp. 93.557.050,- dan bersisa Rp. 17.817.950,- atau sebesar 84,00% dari yang dianggarkan karena efisiensi pemakaian BBM.
* Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp. 48.625.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.560.000,- dan bersisa Rp. 9.065.000,- atau sebesar 81,36% dari yang dianggarkan karena banyaknya paket pelatihan yang tidak terlaksana.
* Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD yang dianggarkan sebesar Rp. 149.239.250,- terealisasi sebesar Rp. 116.131.100,- dan bersisa Rp. 33.108.150,- atau sebesar 77,82% dari yang dianggarkan karena honor pengelola aset tidak di akomodir pada pergub standar biaya.
* Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 44.258.100,- dan bersisa Rp. 5.741.900,- atau sebesar 88,52% dari yang dianggarkan karena efisiensi pemakaian BBM.
* Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Pengumpul dan Pengolah Informasi Pasar Kerja yang dianggarkan sebesar Rp. 48.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 40.198.000,- dan bersisa Rp. 7.802.000,- atau sebesar 83,75% dari yang dianggarkan karena setiap kegiatan Bimbingan Teknis tidak boleh melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan aturan yang ada.
* Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang dianggarkan sebesar Rp. 57.556.000,- terealisasi sebesar Rp. 50.385.250,- dan bersisa Rp. 7.170.750,- atau sebesar 87,54% dari yang dianggarkan karena efisiensi pemakaian BBM.

**BAB IV**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2017, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

* Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
* Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.
  1. **Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2017 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berperan sebagai Entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Badan Keuangan Daerah.

* 1. **Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah ***basis kas*** untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan ***basis akrual*** untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

* 1. **Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar adalah sebagai berikut :

**Pengukuran/ Penilaian Aset**

1. **Kas**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

1. **Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

1. **Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

1. **Persediaan disajikan sebesar :**
   * Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
   * Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
2. **Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah mapun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran porsentase kepemilikkan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika porsentase kepemilikkan melebihi 20% dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya

1. **Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

1. **Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak lansung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

1. **Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

1. **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

1. **Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

1. **Kontruksi Dalam Pengerjaan**

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

* Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
* Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

* Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
* Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

1. **Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi**

Berdasarkan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

* + 1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
    2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
    3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.
  1. **Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), dan memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut yang berdasar kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap.

**BAB V**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**

**5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| 1. | Pendapatan Retribusi Daerah | 458.500.000,- | 461.892.091,- | 100,74 | 448.978.728,- |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2017 dan 2016. Untuk realisasi Tahun 2017 mencapai 100,74% dari anggarannya, hal ini disebabkan karena tercapainya target pendapatan dari masing – masing objek retribusi.

Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016, maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 12.913.363,- hal ini disebabkan karena selalu dilakukan upaya- upaya perbaikan dalam pencapaian target retribusi seperti perbaikan beberapa objek retribusi.

Pendapatan ini terdiri dari:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| - | Penyewaan Tanah dan Bangunan | 68.500.000,- | 84.645.086,- | 123,57 | 448.978.728,- |
| - | Laboratorium | 390.000.000,- | 377.247.005,- | 96,73 | 0,- |
|  | **Jumlah** | **458.500.000,-** | **461.892.091,-** | **100,74** | **448.978.728,-** |

Penerimaan pendapatan Retribusi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

**5.1.2.** **PENJELASAN POS-POS BELANJA**

1. **Belanja Operasi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| a. | Belanja Pegawai | 20.661.190.312,- | 19.595.326.386,- | 94,84 | 18.005.742.883,- |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 dan 2016. Untuk realisasi Tahun 2017 mencapai 94,84% dari anggarannya, sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.065.863.926,-, hal ini disebabkan karena banyak pegawai yang memasuki usia pensiun.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 terdapat kenaikan sebesar Rp. 1.589.583.503,- hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah pegawai fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji, tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan insentif pemungutan retribusi.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| - | Gaji Dan Tunjangan | 15.759.485.927,- | 14.944.380.937,- | 94,83 | 13.712.089.945,- |
| - | Tambahan Penghasilan PNS | 4.887.949.385,- | 4.637.190.449,- | 94,87 | 4.283.399.938,- |
| - | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 13.755.000,- | 13.755.000,- | 100 | 10.253.000,- |
|  | **Jumlah** | **20.661.190.312,-** | **19.595.326.386,-** | **94,84** | **18.005.742.883,-** |

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2017 sejumlah Rp. 55.798.679,- yang terdiri dari :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tanggal** | **Keterangan** | **Jumlah** |
| 1. | 7 Maret 2017 | Setoran pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan Pegawai bulan Januari 2017 An. Joni Atman, S.Sos dan Trimurti, S.Sos | 1.420.000,- |
| 2. | 2 Mei 2017 | Setoran pengembalian gaji An. Efrizaldi tahun 2017 | 4.504.900,- |
| 3. | 11 Juli 2017 | Setoran pengembalian pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan Januari dan Maret 2017 pegawai Pengawasan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat | 44.010.707,- |
| 4. | 11 Juli 2017 | Setoran pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional An. Hanny Rouly Tanjung, SE dkk | 2.165.000,- |
| 5. | 29 Agustus 2017 | Setoran pengembalian pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan Agustus 2017 An. Syafnil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1.223.872,- |
| 6. | 11 September 2017 | Setoran pengembalian pembayaran tunjangan fungsional bulan Juli 2017 An. Khairunas, S.Pd dkk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2.000.000,- |
| 7. | 4 Desember 2017 | Setoran pengembalian kelebihan gaji An. Deva Fajrisa, A.Md bulan Desember 2017 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 474.200,- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| b. | Belanja Barang & Jasa | 16.842.053.017,- | 15.842.325.633,- | 94,06 | 11.442.351.722,- |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 dan 2016. Untuk realisasi Tahun 2017 mencapai 94,06.% dari anggarannya, sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 999.727.384,-, hal ini disebabkan karena effesiensi biaya.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 terdapat kenaikan sebesar Rp. 4.399.973.911,-hal ini disebabkan karena perencanaannya menyesuaikan dengan kebutuhan kantor setiap tahunnya.

Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| - | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.220.844.444,- | 2.029.659.583,- | 91,39 | 2.629.078.413,- |
| - | Belanja Bahan/Material | 1.471.296.493,- | 1.427.811.000,- | 97,04 | 768.731.200,- |
| - | Belanja Jasa Kantor | 2.334.279.500,- | 2.216.288.837,- | 94,95 | 1.567.329.708,- |
| - | Belanja Premi Asuransi | 37.600.000,- | 37.368.300,- | 99,38 | 34.374.750,- |
| - | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 196.257.000,- | 157.142.886,- | 80,07 | 168.061.916,- |
| - | Belanja Cetak dan Penggandaan | 329.936.400,- | 309.164.200,- | 93,70 | 278.677.290,- |
| - | Belanja Sewa Rumah/Gedung /Gudang /Parkir | 42.805.000,- | 40.805.000,- | 95,33 | 3.825.000,- |
| - | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 6.700.000,- | 6.350.000,- | 94,78 | 8.000.000,- |
| - | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 170.850.000,- | 160.850.000,- | 94,15 | 4.600.000,- |
| - | Belanja Makanan dan Minuman | 2.219.177.250,- | 2.160.331.000,- | 97,35 | 1.081.140.000,- |
| - | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 190.400.000,- | 186.300.000,- | 97,85 | 125.280.000,- |
| - | Belanja Pakaian Kerja | 307.180.000,- | 305.911.000,- | 99,59 | 148.060.000,- |
| - | Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu | 5.000.000,- | 5.000.000,- | 100 | 0,- |
| - | Belanja Perjalanan Dinas | 3.908.717.000,- | 3.606.885.870,- | 92,28 | 2.330.743.508,- |
| - | Belanja Pemeliharaan | 353.197.500,- | 333.594.500,- | 94,45 | 349.520.150,- |
| - | Belanja Jasa Konsultansi | 58.328.000,- | 54.772.000,- | 93,90 | 0,- |
| - | Belanja Hibah Barang atau Jasa | 124.500.000,- | 122.100.000,- | 98,07 | 0,- |
| - | Belanja Jasa Lembaga | 387.263.692,- | 384.985.523,- | 99,41 | 195.523.406,- |
| - | Honorarium PNS | 1.386.005.000,- | 1.307.635.000,- | 94,35 | 889.067.900,- |
| - | Honorarium Non PNS | 859.072.674,- | 770.503.484,- | 89,69 | 632.016.342,- |
| - | Belanja Kontribusi | 24.045.000,- | 18.000.000,- | 74,86 | 3.500.000,- |
| - | Belanja Jasa Lainnya | 193.598.064,- | 186.767.450,- | 96,47 | 206.972.139,- |
| - | Belanja Vakasi/Verifikasi | 15.000.000,- | 14.100.000,- | 94,00 | 17.850.000,- |
|  | ***Jumlah.........*** | **16.842.053.017,-** | **15.842.325.633,-** | **94,06** | **11.442.351.722,-** |

Khusus mengenai belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga yaitu kepada para kelompok usaha kripik di Kota Pariaman dan Batusangkar, yang terdiri dari :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Jumlah** | **Satuan** | **Harga Satuan**  **(Rp)** | **Total**  **(Rp)** |
| 1. | Mesin Perajang Singkong | 10 | Buah | 6.100.000,- | 61.000.000,- |
| 2. | Mesin Peniris Minyak | 10 | Buah | 5.000.000,- | 50.000.000,- |
|  | **Jumlah** | | |  | **111.000.000,-** |
|  | **PPn 10%** | | |  | **11.100.000,-** |
|  | **Total** | | |  | **122.100.000,-** |

Yang Diterima Oleh Pihak Ketiga diantaranya :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Organisasi** | **Kab/Kota** | **Uraian** | **Jumlah** |
| 1. | Neneng Awalia | Kelompok Usaha Kripik Ubi Dahlia | Tanah Datar | * Mesin Perajang Singkong * Mesin Peniris Minyak | * 1 buah * 1 buah |
| 2. | Liza Herlina | Kelompok Usaha Kripik Ubi Melati | Tanah Datar | * Mesin Perajang Singkong * Mesin Peniris Minyak | * 1 buah * 1 buah |
| 3. | Susna Dewi | Kelompok Usaha Kripik Ubi Barokah | Tanah Datar | * Mesin Perajang Singkong * Mesin Peniris Minyak | * 1 buah * 1 buah |
| 4. | Endang Juli Marnis | Kelompok Usaha Kripik Ubi Mawar | Tanah Datar | * Mesin Perajang Singkong * Mesin Peniris Minyak | * 1 buah * 1 buah |
| 5. | Ririn Sumawati | Kelompok Usaha Kripik Ubi Sakato | Tanah Datar | * Mesin Perajang Singkong * Mesin Peniris Minyak | * 1 buah * 1 buah |
| 6. | Zaimar Taher | Kelompok Usaha Kripik Ubi Bersama Jaya Empat | Pariaman | * Mesin Perajang Singkong * Mesin Peniris Minyak | * 1 buah * 1 buah |
| 7. | Anis Shiliwati | Kelompok Usaha Kripik Ubi Bersama Jaya Dua | Pariaman | * Mesin Perajang Singkong * Mesin Peniris Minyak | * 1 buah * 1 buah |
| 8. | Ratna Guswita | Kelompok Usaha Kripik Ubi Bersama Jaya Tiga | Pariaman | * Mesin Perajang Singkong * Mesin Peniris Minyak | * 1 buah * 1 buah |
| 9. | Yeti Efrina | Kelompok Usaha Kripik Ubi Bersama Jaya Tiga | Pariaman | * Mesin Perajang Singkong * Mesin Peniris Minyak | * 1 buah * 1 buah |
| 10. | Ridho Ilham | Kelompok Usaha Kripik Ubi Bersama Jaya Satu | Pariaman | * Mesin Perajang Singkong * Mesin Peniris Minyak | * 1 buah * 1 buah |

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2017 sejumlah Rp. 24.716.978,- yang terdiri dari :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tanggal** | **Keterangan** | **Jumlah** |
| 1. | 29 November 2017 | Setoran pengembalian pembayaran pembaca do'a / al-qur'an | 200.000,- |
| 2. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan bayar belanja cetak sertifikat kegiatan Bimtek BKK berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 210.000,- |
| 3. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan bayar belanja cetak sertifikat kegiatan Bimtek IPK berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 280.000,- |
| 4. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan pembayaran belanja transportasi peserta Bimtek IPK berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 400.000,- |
| 5. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas (Taksi Narasumber pusat) berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 590.000,- |
| 6. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan pembayaran honorarium tim penetapan Upah Minimum Provinsi dan belanja vakasi berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 1.500.000,- |
| 7. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan bayar belanja honor narasumber daerah berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 425.000,- |
| 8. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan bayar belanja transportasi peserta kegiatan pelatihan Soft Skill Instruktur berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 2.850.000,- |
| 9. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan bayar belanja transportasi peserta kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi Metedologi berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 500.000,- |
| 10. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan bayar belanja cetak sertifikat kegiatan pelatihan Soft Skiil Instruktur berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 510.000,- |
| 11. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan bayar belanja cetak sertifikat kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi Metedologi berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 1.020.000,- |
| 12. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan pembayaran penginapan kegiatan pemeriksaan kesehatan kerja berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 3.210.000,- |
| 13. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan pembayaran penginapan kegiatan pengujian lingkungan kerja berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 5.010.000,- |
| 14. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan pembayaran cetak sertifikat kegiatan Sosalisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 350.000,- |
| 15. | 29 Desember 2017 | Setoran pengembalian belanja perjalanan dinas luar negeri berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 3.201.978,- |
| 16. | 29 Desember 2017 | Setoran pengembalian belanja perjalanan dinas luar daerah berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 360.000,- |
| 17. | 29 Desember 2017 | Setoran kelebihan belanja cetak sertifikat dan cetak kulit laporan kegiatan pelatihan kewirausahaan mandiri berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 1.950.000,- |
| 18. | 29 Desember 2017 | Setoran kelebihan belanja cetak sertifikat dan cetak kulit laporan kegiatan pelatihan motivasi berprestasi bagi usaha produktif berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 2.150.000,- |

1. **Belanja Modal**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
|  | Belanja Modal | 677.176.400,- | 664.001.000,- | 98,05 | 3.954.664.200,- |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2017 dan 2016 . Realisasi tahun 2017 mencapai 98,05% dari anggarannya, hal ini disebabkan karena effesiensi dan penyetoran pembayaran hasil temuan inspektorat.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat penurunan sebesar Rp. 3.290.663.200,- hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Adapun rincian objek belanja modal terdiri dari :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| 1. | Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 0,- | 0,- |  | 233.790.000,- |
| 2. | Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor | 343.141.000,- | 333.380.000,- | 97,16 | 102.025.000,- |
| 3. | Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga | 0,- | 0,- |  | 161.007.000,- |
| 4. | Belanja Modal Pengadaan Sistim Komputer | 0,- | 0,- |  | 25.355.000,- |
| 6. | Bangunan Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 334.035.400,- | 330.621.000,- | 98,98 | 3.432.487.200,- |
|  | ***Jumlah.........*** | **677.176.400,-** | **664.001.000,-** | **98,05** | **3.954.664.200,-** |

Saldo / jumlah belanja modal tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian belanja modal selama tahun 2017 sejumlah Rp. 8.531.000,- yang terdiri dari :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tanggal** | **Keterangan** | **Jumlah** |
| 1. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan pembayaran atas pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 2.706.000,- |
| 2. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan pembayaran atas pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 5.825.000,- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| a. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 343.141.000,- | 333.380.000,- | 97,16 | 522.177.000,- |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2017 dan 2016. Realisasi tahun 2017 mencapai 97,16% dari anggarannya, sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 9.761.000,-, hal ini disebabkan karena effisiensi dan pengembalian kelebihan pembayaran hasil temuan inspektorat.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat penurunan sebesar Rp. 188.797.000,- hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor.

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| 1. | Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 0,- | 0,- |  | 233.790.000,- |
| 2. | Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 343.141.000,- | 333.380.000,- | 97,16 | 102.025.000,- |
| 3. | Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga | 0,- | 0,- |  | 161.007.000,- |
| 4. | Belanja Modal Pengadaan Sistim Komputer | 0,- | 0,- |  | 25.355.000,- |
|  | ***Jumlah.........*** | **343.141.000,-** | **333.380.000,-** | **97,16** | **522.177.000,-** |

Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dikapitalisir terdiri dari :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Jumlah Unit** | | **Harga Satuan** | **Total Harga** |
| 1. | Kain Gorden | 39 | M2 | 199.925,- | 7.797.000,- |
| 2. | Gorden Vertikal Blen | 60 | M2 | 297.000,- | 17.820.000,- |
|  | ***JUMLAH*** | | | | **25.617.000,-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | Perkiraan | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| b. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 334.035.400,- | 330.621.000,- | 98,98 | 3.432.487.200,- |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2017 dan 2016 Realisasi tahun 2017 mencapai 98,98% dari anggarannya, sisa Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp. 3.414.400,-, hal ini disebabkan karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan pengembalian kelebihan pembayaran hasil temuan inspektorat.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat penurunan sebesar Rp. 3.101.866.200,-, hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor dan adanya penyesuaian standar biaya.

Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | Perkiraan | **Anggaran 2017** | **Realisasi 2017** | **%** | **Tahun 2016** |
| 1. | Bangunan Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 334.035.400,- | 330.621.000,- | 98,98 | 3.432.487.200,- |

Daftar Belanja Modal Tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 21 dan Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada Lampiran 22.

Tidak dikapitalisirnya belanja modal tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 .Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015.

**5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA**

**5.2.1. Aset**

**Aset Lancar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Kas di Bendahara Pengeluaran** | **0,-** | **0,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016. Sampai dengan 31 Desember 2017 , sisa UYHD sebesar Rp. 44.653.467,- , telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 27, 28 dan 29 Desember 2017. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2017.

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Kas di Bendahara Penerima** | **0,-** | **0,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 2016 . Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2017.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |
| 1. **Beban Dibayar Dimuka** | **29.806.917,-** | **31.510.187,50** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016, yaitu beban jasa dibayar dimuka /beban sewa dibayar dimuka berupa :

Beban Premi Asuransi kendaraan roda 4 yang telah dibayarkan pada tanggal 14 November 2017 dengan jumlah premi selama setahun berjumlah Rp. 35.768.300,-

Beban tahun ini selama 2 bulan adalah sebesar :

2/12 X Rp. 35.768.300,- = Rp. 5.961.383,-

Beban tahun depan/Beban dibayar dimuka adalah sebesar :

Rp. 35.768.300 – Rp. 5.961.383,- = Rp 29.806.917

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Asuransi dibayar dimuka | 31.510.187,50 | 30.949.774,- | 32.653.044,50 | 29.806.917,- |

Penambahan adalah Rp. 30.949.774,- dan pengurangan adalah Rp. 32.653.044,50 adalah penyesuaian beban dibayar dimuka semester I dan semester II.

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |
| 1. **Persediaan** | **9.200.670,-** | **7.709.850,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016, yaitu :

Adapun persediaan tersebut terdiri dari :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERKIRAAN** | **2017** | **2016** |
| **Persediaan Bahan Pakai Habis :** |  |  |
| * Persediaan ATK | 3.010.950,- | 3.144.800,- |
| * Persediaan Alat listrik dan elektronik | 502.400,- | 1.472.500,- |
| * Persediaan perlatan kebersihan dan bahan pembersih | 573.420,- | 1.974.780,- |
| * Persediaan peral/perlk pkai habis | 212.200,- | 539.900,- |
| * Pesediaan bahan dokumentasi/cetakan | 4.901.700,- | 577.870,- |
| **Jumlah** | **9.200.670,-** | **7.709.850,-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| **Persediaan Bahan Pakai Habis :** |  |  |  |  |
| * Persediaan ATK | 3.144.800,- | 1.451.350,- | 1.585.200,- | 3.010.950,- |
| * Persediaan Alat listrik dan elektronik | 1.472.500,- | 261.750,- | 1.231.850,- | 502.400,- |
| * Persediaan perlatan kebersihan dan bahan pembersih | 1.974.780,- | 219.400,- | 1.620.760,- | 573.420,- |
| * Persediaan peral/perlk pkai habis | 539.900,- | 0,- | 327.700,- | 212.200,- |
| * Pesediaan bahan dokumentasi/cetakan | 577.870,- | 4.623.300,- | 299.470,- | 4.901.700,- |

Penambahan dan pengurangan adalah penyesuaian persediaan semester I dan semester II berdasarkan stock opname persediaan.

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

**Aset Tetap**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |
|  |  |  |
| 1. **Tanah** | **51.232.825.000,-** | **55.507.305.000,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2017 dan 2016.

1. **Dasar Penilaian**
   1. Neraca Awal 2005 Rp. 47.822.520.000,-
   2. Apraisal 2012 Rp. 3.410.305.000,-

Daftar Tanah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

1. **Mutasi Tambah Kurang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Tanah | 55.507.305.000,- | 0,- | 4.274.480.000,- | 51.232.825.000,- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saldo Audited 2016** |  | **55.507.305.000,-** |
| **Mutasi Kurang** |  |  |
| Mutasi antar OPD | 4.274.480.000,- |  |
| **Total Mutasi Kurang** |  | **4.274.480.000,-** |
| **Saldo per 31 Des 2017** |  | **51.232.825.000,-** |

**Penjelasan Mutasi Kurang**

Mutasi berupa tanah kantor, dari Disnakertrans ke Dukcapil senilai Rp. 4.274.480.000,- dengan BAST No.031/1/BAST/BAP2BMD-III/2017 tanggal 2 Januari 2017.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran .17.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Peralatan dan Mesin** | **11.251.461.494,28** | **8.214.957.450,28** |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2017 dan 2016 .

1. **Dasar Penilaian**
   1. Neraca Awal 2005 Rp. 1.754.485.060,-
   2. Harga Perolehan 2006 sd 2017 Rp. 9.293.351.434,28
   3. Appraisal 2011 Rp. 203.625.000,-

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

1. **Mutasi Tambah Kurang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | | **Saldo Awal** | **Penambahan** | | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** | |
| Peralatan & Mesin | | 8.214.957.450,28 | 3.116.378.764,- | | 79.874.720,- | 11.251.461.494,28 | |
| Akm Peny Peralatan & Mesin | | 6.140.177.419,48 | 2.651.428.972,04 | | 0,01,- | 8.791.606.391,51 | |
| Nilai Buku | | 2.074.780.030,80 | 464.949.791,96 | | 79.874.719,99 | 2.459.855.102,77 | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | **Saldo Audited 2016** | | |  | **8.214.957.450,28** | |
|  | **Mutasi Tambah** | | |  |  | |
|  | Belanja Modal tahun 2017 | | | 333.380.000,- |  | |
|  | Pindah ke Pusat (UU 23 th 2014) | | | 1.468.926.300,- |  | |
|  | Hibah dari Pihak Ketiga | | | 1.314.072.464,- |  | |
|  | Mutasi antar OPD | | |  |  | |
|  | **Total Mutasi Tambah** | | |  | **3.116.378.764,-** | |
|  | **Mutasi Kurang** | | |  |  | |
|  | Belanja Modal Yang tdk | | |  |  | |
|  | Dikapitalisir | | | 79.874.720,- |  | |
|  | **Total Mutasi Kurang** | | |  | **79.874.720,-** | |
|  | **Saldo per 31 Des 2017** | | |  | **11.251.461.494,28** | |

**Penjelasan Mutasi Tambah**

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 333.380.000,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
2. Penambahan nilai aset KIB B disebabkan UU 23 Tahun 2014 dan adendeum BAST P2D sebesar Rp. 1.468.926.300,- dari kota Padang sebesar Rp. 1.408.981.600,- dan dari Bukittinggi sebesar Rp. 62.495.600,- (Intra senilai Rp. 59.944.700 dan extra senilai Rp. 2.550.900,-). (Daftar barang dan BAST terlampir)
3. Hibah dari Kementerian Ketenagakerjaan senilai Rp. 728.557.000,- berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementrian Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat No.SPK.342/LATTAS/XII/2016 No. 021/183/BLK-PYK/Nakertrans/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Hibah Barang Milik Negara Kementerian Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan Berita Acara Serah Terima Nomor. BA.68/LATTAS/XII/2016/ BA.021/184/BLK-PYK/Nakertrans/2016 tanggal 16 Desember 2016, yang terdiri dari :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kode Barang** | **NUP** | **Nama Barang** | **Merk/ Type** | **Tahun Perolehan** | **Nilai Perolehan** | |
| 1 | 3040106020 | 3-7 | Ragum/Catok |  | 2010 | Rp | 4.400.000,- |
| 2 | 3050105048 | 1 | LCD Proyector/Infocus |  | 2010 | Rp | 6.600.000,- |
| 3 | 3050201001 | 1-2 | Meja Kerja Besi/Metal |  | 2010 | Rp | 5.500.000,- |
| 4 | 3080110114 | 1-10 | Driying Oven | CEA | 2010 | Rp | 16.500.000,- |
| 5 | 3100102002 | 1 | Lap Top | TOSHIBA | 2007 | Rp | 20.850.000,- |
| 6 | 3100102002 | 2 | Lap Top | TOSHIBA | 2010 | Rp | 8.250.000,- |
| 7 | 3150203999 | 1-4 | Topi Kerja Lainnya | CEA | 2010 | Rp | 9.900.000,- |
| 8 | 3170122031 | 1-6 | Welding Machine | CEA | 2010 | Rp | 330.000.000,- |
| 9 | 3170122031 | 7 | Welding Machine | CEA | 2010 | Rp | 161.557.000,- |
| 10 | 3170122031 | 8-9 | Welding Machine | CEA | 2010 | Rp | 137.500.000,- |
| 11 | 3170122031 | 10 | Welding Machine | CEA | 2010 | Rp | 27.500.000,- |
| **Jumlah** | | | | | | Rp | **728.557.000,-** |

1. Hibah dari Kementerian Ketenagakerjaan senilai Rp. 585.515.464,- berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementrian Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat No. SPK. 1809/LATTAS/IX/2017/ No. 030/1809/Set/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Hibah Barang Milik Negara Kementerian Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan Berita Acara Serah Terima Nomor. BA.100/LATTAS/IX/2017/ BA.030/100/Set/2017 tanggal 26 September 2017. (Daftar barang terlampir)

**Penjelasan Mutasi Kurang**

* + - * 1. Adanya belanja modal tahun 2017 yang tidak dikapitalisir yaitu kain gorden senilai Rp. 7.797.000,-, dan gorden (vertikal blen) senilai Rp. 17.820.000,-.
        2. Hibah dari Kementerian yang tidak dikapitalisir yaitu ragum/alat bengkel senilai Rp. 4.400.000,- berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementrian Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat No.SPK.342/LATTAS/XII/2016 No. 021/183/BLK-PYK/Nakertrans/2016 tanggal 16 Desember 2016.
        3. Hibah dari Kementerian yang tidak dikapitalisir yaitu perkakas bengkel,alat ukur dll senilai Rp. 49.857.720,- berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementrian Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat No. SPK. 1809/LATTAS/IX/2017/ No. 030/1809/Set/2017 tanggal 26 September 2017

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 17.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Gedung dan Bangunan** | **12.276.996.816,49** | **12.200.075.816,49** |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2017 dan 2016 .

1. **Dasar Penilaian**
   1. Neraca Awal 2005 Rp. 4.260.731.000,-
   2. Harga Perolehan 2006 sd 2017 Rp. 6.398.011.696,49
   3. Appraisal 2011 Rp. 1.618.254.120,-

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

1. **Mutasi Tambah Kurang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Gedung & Bangunan | 12.200.075.816,49 | 330.621.000,- | 253.700.000,- | 12.276.996.816.49 |
| Akm Peny Gedung & Bangunan | 3.801.573.032,30 | 247.034.420,03 | 187.738.000,- | 3.860.869.452,33 |
| Nilai Buku | 8.398.502.784,19 | 330.621.000,- | 312.996.420,03 | 8.416.127.364,16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Saldo Audited 2016** |  | **12.200.075.816,49** |
|  | **Mutasi Tambah** |  |  |
|  | Belanja Modal tahun 2017 | 330.621.000,- |  |
|  | **Total Mutasi Tambah** |  | **330.621.000,-** |
|  | **Mutasi Kurang** |  |  |
|  | Mutasi Antar OPD | 253.700.000,- |  |
|  | **Total Mutasi Kurang** |  | **253.700.000,-** |
|  | **Saldo per 31 Des 2017** |  | **12.276.996.816.49** |

**Penjelasan Mutasi Tambah**

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 330.621.000,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

**Penjelasan Mutasi Kurang**

1. Mutasi kurang Aset Tetap bangunan kantor UPTD BPPD dan Gedung pertemuan senilai Rp.253.700.000,- dengan BAST No.030/1/BAST/BAP2BMD-III/2017 tanggal 2 Januari 2017

Rekapitulasi / daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 17.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Akumulasi Penyusutan** | **12.652.475.843,84** | **9.941.750.451,78** |

Terdiri dari :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin | **8.791.606.391,51** | **6.140.177.419,48** |
| * Akumulasi Penyusutan Gdg dan Bangunan | **3.860.869.452,33** | **3.801.573.032,30** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2017 dan 2016. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Akm.Peralatan dan Mesin | 6.140.177.419,48 | 2.651.428.972,04 | 0.01 | 8.791.606.391,51 |
| Akm.Gedung dan Bangunan | 3.801.573.032,30 | 247.034.420,03 | 187.738.000,- | 3.860.869.452,33,- |
| Jumlah Akm Penyusutan | **9.941.750.451,78** | **2.898.463.392,07** | **187.738.000,01** | **12.652.475.843,84** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Peralatan & Mesin** | **Gedung & Bangunan** | **Jln Irigasi & Jaringan** | **Aset Tetap Lainnya** |
| SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2016 (NERACA ) | **6.140.177.419,48** | **3.801.573.032,30** | **0,-** | **0,-** |
| * JUMLAH KOREKSI TAMBAH: | **2.651.428.972,04** | **247.034.420,03** | **0,-** | **0,-** |
| * + Kurang Catat/tdk tercatat |  |  |  |  |
| * + Pindah ke Pusat/Kab akibat UU 23 Tahun 2014 | 982.591.091,67 |  |  |  |
| * + Koreksi + nilai sesuai aplikasi |  |  |  |  |
| * + Hibah dr Pihak Ketiga | 600.337.446,29,- |  |  |  |
| * + Mutasi antar SKPD |  |  |  |  |
| * + Reklasifikasi |  |  |  |  |
| * + Koreksi + Saldo Awal |  |  |  |  |
| * + Beban Penyusutan | 1.068.500.434,08 | 247.034.420,03 |  |  |
| * JUMLAH KOREKSI KURANG: | **0.01** | **187.738.000,-** | **0,-** | **0,-** |
| * + Koreksi – nilai sesuai appraisal | 0.01 |  |  |  |
| * + Double Record |  |  |  |  |
| * + Hibah |  |  |  |  |
| * + Penghapusan |  |  |  |  |
| * + Mutasi antar SKPD |  | 187.738.000,- |  |  |
| * + Reklasifikasi |  |  |  |  |
| * + Koreksi - Saldo Awal |  |  |  |  |
| * BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2017 | **1.068.500.434,08** | **247.034.420,03** |  |  |
| * SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 17 | **8.791.606.391,51** | **3.860.869.452,33** | **0,-** | **0,-** |

**Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan** **Peralatan dan Mesin**

**Penjelasan Mutasi Tambah**

1. Penambahan nilai aset KIB B disebabkan UU 23 Tahun 2014 dan adendeum BAST P2D sebesar Rp. 1.468.926.300,- dari kota Padang sebesar Rp. 1.408.981.600,- dan dari Bukittinggi sebesar Rp. 62.495.600,- (Intra senilai Rp. 59.944.700 dan extra senilai Rp. 2.550.900,-)
2. Hibah dari Kementerian senlai Rp. 585.515.464,- berupa alat ukur, multimeter,dll dengan BAST No. 1976/NAKER-SJ/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan nilai akumulasi penyusutan Rp. 73.147.546,29 dan Hibah dari kementerian Ketenagakerjaan senilai Rp. 728.557.000,- berupa laptop meja kerja, drying oven dll dengan BAST No.021/183/BLK-PYK / Nakertrans /2016 tanggal 16 Desember 2016 dengan nilai akumulasi penyusutan Rp. 527.189.900,-
3. Beban Penyusutan Tahun 2017 senilai Rp. 915.157.709,68

**Penjelasan Mutasi Kurang**

a.Koreksi kurang nilai sesuai aplikasi senilai Rp. 0.01,- berdasarkan hasil aplikasi yang disesuaikan

**Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan** **Gedung dan Bangunan**

**Penjelasan Mutasi Tambah**

1. Beban Penyusutan Tahun 2017 senilai Rp. 247.034.420,03

**Penjelasan Mutasi Kurang**

1. Mutasi kurang Aset Tetap bangunan kantor UPTD BPPD dan Gedung pertemuan senilai Rp.253.700.000,- dengan BAST No.030/1/BAST/BAP2BMD-III/2017 tanggal 2 Januari 2017 dengan nilai akumulasi penyusutan Rp. 187.738.000,-

**ASET LAINNYA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |
| 1. **Aset Lain-Lain** | **3.583.110,-** | **3.583.110,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2017 dan 2016.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Aset Tidak Bermanfaat | 3.583.110,- | 0,- | 0,- | 3.583.110,- |
| Aset Dimanfaatkan Pihak Lain | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Aset Dalam Penelusuran | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |

.

**Aset Lain-lain terdiri dari Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 3.583.110,-**

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut:

1. **Aset Tidak Bermanfaat**

Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp.3.583.110,-tersebut dicatat berdasarkan nilai buku per 31 Des 2017 .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Aset Tidak Bermanfaat | 515.126.765,- | 0,- | 265.956.655,- | 249.170.110,- |
| Akm Penyusutan | 511.543.655,- | 0,- | 265.956.655,- | 245.587.000,- |
| Nilai Buku | 3.583.110,- | 0,- | 0,- | 3.583.110,- |

**Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Aset Tidak Bermanfaat**

**Penjelasan Mutasi kurang**

1. Penghapusan senilai Rp. 265.956.655,- dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp. 265.956.655,- berdasarkan SK nomor : 030-1137-2017 Tanggal 29 Desember 2017 yaitu berupa lemari, mesin tik, filling,dll nomor : 030-1137-2017 tanggal 29 Desember 2017 Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Bermanfaat dapat dilihat pada Lampiran 18.

**KEWAJIBAN**

**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Pendapatan Diterima Dimuka** | **0,-** | **3.560.605,68** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016. Sampai dengan 31 Desember 2017 pendapatan diterima dimuka sebesar Rp.0,- Karena semua pendapatan sudah diakui sebagai pendapatan tahun 2017.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 3.560.605,68 | 0,- | 3.560.605,68 | 0,- |

Pengurangan sebesar Rp. 3.560.605,68 adalah karena sudah diakui sebagai pendapatan seiring dengan periode sewa.

Daftar pendapatan diterima dimuka dapat dillihat pada Lampiran 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |
| **2. Utang Belanja** | **803.642.371,-** | **799.311.619,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2017 dan 2016. Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

* Utang belanja pegawai Rp. 765.211.996,-

Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebesar Rp. 375.655.095,- dan bulan Desember sebesar Rp. 389.556.901,-. Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2015 tgl 24 Februari 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pasal 9 yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Utang Belanja Pegawai | 763.015.130,- | 765.211.996,- | 763.015.130,- | 765.211.996,- |

Penambahan sebesar Rp. 765.211.996,- adalah penyesuaian utang pegawai 2017 berupa Tunda November dan Desember 2017 yang akan dibayarkan pada tahun 2018.

Pengurangan sebesar Rp. 763.015.130,- adalah berupa utang tahun lalu yang sudah dibayarkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 761.750.809,- dan ekuitas Rp. 1.264.321,-.

* Utang belanja barang dan Jasa Rp. 38.430.375,-

Yaitu utang belanja telp, listrik, air, internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2017 yang dibayarkan bulan Januari .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Utang Belanja Barang dan Jasa | 36.296.489,- | 38.430.375,- | 36.296.489,- | 38.430.375,- |

Penambahan sebesar Rp. 38.430.375,- adalah penyesuaian utang belanja barang dan jasa 2017 berupa utang jasa telepon, listrik, air dan internet yang akan dibayarkan pada tahun 2018.

Pengurangan sebesar Rp. 36.296.489,- adalah berupa utang tahun lalu yang sudah dibayarkan pada tahun 2017.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

**EKUITAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Ekuitas** | **61.347.755.792,93** | **65.220.518.737,81** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016 . Ekuitas ini terdiri dari:

|  |  |
| --- | --- |
| * Ekuitas | 62.000.795.294,86 |
| * Surplus/Defisit LO | (36.292.800.429,93) |
| * Perubahan SAL | 35.639.760.928,- |
| * Surplus/Defisit LRA | (35.639.760.928,-) |
| * RK/PPKD | 35.639.760.928,- |
| * Ekuitas Akhir | **61.347.755.792,93** |

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara OPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

**5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

**5.3.1 PENDAPATAN-LO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Pendapatan Retribusi Daerah -LO** | **465.452.696,68** | **459.660.545,04** |

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah -LO dalam Tahun 2017 dan Tahun 2016. Bila dibandingkan dengan Tahun 2016, maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 5.792.151,64.

Pendapatan ini terdiri dari:

* Pendapatan sewa tanah dan bangunan sebesar Rp. 461.892.091,-
* Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp. 3.560.605,68 yang menambah pendapatan-LO

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO dapat dijelaskan sbb:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objek Pendapatan LRA/LO** | **Pendapatan-LRA** | **Pendapatan-LO** | **Selisih +/-** |
| * Pendapatan Pajak Daerah | 0- | 0- | 0- |
| * Pendapatan Retribusi Daerah | 461.892.091,- | 465.452.696,68 | (3.560.605,68) |
| **Jumlah** | **461.892.091,-** | **465.452.696,68** | **(3.560.605,68)** |

Penjelasan Selisih :

1. Penyesuaian pendapatan :
   * Penyesuaian atas pendapatan diterima dimuka tahun 2017 yaitu Pendapatan Sewa Lahan dan Gedung sebesar Rp. 21.363.634,08 selama 2 tahun yang di sewa semenjak pada tanggal 15 Mei 2015, yang menjadi pendapatan tahun berjalan tahun 2016 sebesar Rp. 17.803.028,40 dan pengakuan pendapatan diterima dimuka selama tahun 2017 sebesar Rp. 3.560.605,68

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objek Pendapatan LRA/LO** | **Penyesuaian Smtr 1** | | **Penyesuaian Smtr 2** | | **Jumlah** | |
|  | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| * Pendapatan Retribusi | 0,- | 3.560.605,68 | 0,- | 0,- | 0,- | 3.560.605,68 |
| **Jumlah** | **0,-** | **3.560.605,68** | **0.-** | **0,-** | 0,- | **3.560.605,68** |

**5.3.2 BEBAN**

**Beban Operasi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Beban Pegawai** | **19.598.787.573,-** | **18.032.897.411,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2017 dan Tahun 2016. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO dan Beban tambahan penghasilan PNS-LO, yaitu :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Realisasi 2017** | **Tahun 2016** |
| - | Beban Gaji dan Tunjangan – LO | 14.944.380.937,- | 13.712.089.945,- |
| - | Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO | 4.640.651.636,- | 4.310.554.466,- |
| - | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 13.755.000,- | 10.253.000,- |
|  | **Jumlah** | **19.598.787.573,-** | **18.032.897.411,-** |

Saldo / jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian beban pegawai selama tahun 2017 sejumlah Rp. 55.798.679,- yang terdiri dari :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tanggal** | **Keterangan** | **Jumlah** |
| 1. | 7 Maret 2017 | Setoran pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan Pegawai bulan Januari 2017 An. Joni Atman, S.Sos dan Trimurti, S.Sos | 1.420.000,- |
| 2. | 2 Mei 2017 | Setoran pengembalian gaji An. Efrizaldi tahun 2017 | 4.504.900,- |
| 3. | 11 Juli 2017 | Setoran pengembalian pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan Januari dan Maret 2017 pegawai Pengawasan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat | 44.010.707,- |
| 4. | 11 Juli 2017 | Setoran pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional An. Hanny Rouly Tanjung, SE dkk | 2.165.000,- |
| 5. | 29 Agustus 2017 | Setoran pengembalian pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan Agustus 2017 An. Syafnil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1.223.872,- |
| 6. | 11 September 2017 | Setoran pengembalian pembayaran tunjangan fungsional bulan Juli 2017 An. Khairunas, S.Pd dkk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2.000.000,- |
| 7. | 4 Desember 2017 | Setoran pengembalian kelebihan gaji An. Deva Fajrisa, A.Md bulan Desember 2017 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 474.200,- |

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Belanja Pegawai LRA** | **Beban Pegawai LO** | **Selisih +/-** |
| * Gaji dan tunjangan | 14.944.380.937,- | 14.944.380.937,- | 0,- |
| * Tambahan Penghasilan PNS | 4.637.190.449,- | 4.640.651.636,- | (3.461.1897,-) |
| * Insentif Pemungutan Retribusi daerah | 13.755.000,- | 13.755.000,- | 0,- |
| **Jumlah** | **19.595.326.386,-** | **19.598.787.573,-** | **(3.461.187,-)** |

Penjelasan selisih:

1. Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan lalu yaitu bulan November 2016 sebesar Rp. 382.733.075,- dan bulan Desember 2016 sebesar Rp. 379.017.734,- yang dibayarkan pada bulan Januari dan Februari 2017.
2. Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan November 2017 sebesar Rp. 375.655.095,- dan bulan Desember 2017 sebesar Rp. 389.556.901,- berdasarkan hasil verifikasi Laporan HarianPNS yang telah bekerja bulan November dan Desember 2017 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi pada Januari dan Februari 2018 sehingga dicatat sebagai utang belanja pegawai per 31 Desember 2017.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Penyesuaian Smtr 1** | | **Penyesuaian Smtr 2** | | **Jumlah** | |
|  | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| * Belanja Pegawai | 0,- | 761.750.809,- | 765.211.996,- | 0,- | 765.211.996,- | 761.750.809,- |
| **Jumlah** | **0,-** | **761.750.809,-** | **765.211.996,-** | **0,-** | **765.211.996,-** | **761.750.809,-** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Beban Barang & Jasa** | **15.843.930.699,50** | **11.430.154.859,50** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan Tahun 2016. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Realisasi 2017** | **Tahun 2016** |
| - | Beban Bahan Pakai Habis | 2.032.492.593,- | 2.629.928.803,- |
| - | Beban pesediaan Bahan/Material | 1.427.811.000,- | 768.731.200,- |
| - | Beban Jasa Kantor | 2.217.681.453,- | 1.563.339.453,- |
| - | Beban Premi Asuransi | 39.071.570,50,- | 24.436.142,50,- |
| - | Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 157.142.886,- | 168.061.916,- |
| - | Beban Cetak dan Penggandaan | 304.840.370,- | 279.558.900,- |
| - | Beban Sewa Rumah/Gedung /Gudang /Parkir | 40.805.000,- | 3.825.000,- |
| - | Beban Sewa Sarana Mobilitas | 6.350.000,- | 8.000.000,- |
| - | Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 160.850.000,- | 4.600.000,- |
| - | Beban Makanan dan Minuman | 2.160.331.000,- | 1.081.140.000,- |
| - | Beban Pakaian Dinas dan Atributnya | 186.300.000,- | 125.280.000,- |
| - | Beban Pakaian Kerja | 305.911.000,- | 148.060.000,- |
| - | Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu | 5.000.000,- | 0,- |
| - | Beban Perjalanan Dinas | 3.606.885.870,- | 2.330.743.508,- |
| - | Beban Pemeliharaan | 333.594.500,- | 349.520.150,- |
| - | Belanja Jasa Konsultansi | 54.772.000,- | 0,- |
| - | Belanja Hibah Barang atau Jasa | 122.100.000,- | 0,- |
| - | Belanja Jasa Lembaga | 384.985.523,- | 195.523.406,- |
| - | Honorarium PNS | 1.307.635.000,- | 889.067.900,- |
| - | Honorarium Non PNS | 770.503.484,- | 632.016.342,- |
| - | Beban Kontribusi | 18.000.000,- | 3.500.000,- |
| - | Beban Jasa Lainnya | 186.767.450,- | 206.972.139,- |
| - | Beban Vakasi/Verifikasi | 14.100.000,- | 17.850.000,- |
|  | ***Jumlah.........*** | **15.843.930.699,50** | **11.430.154.859,50** |

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian beban barang dan jasa selama tahun 2017 sejumlah Rp. 24.716.978,- yang terdiri dari :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tanggal** | **Keterangan** | **Jumlah** |
| 1. | 29 November 2017 | Setoran pengembalian pembayaran pembaca do'a / al-qur'an | 200.000,- |
| 2. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan bayar belanja cetak sertifikat kegiatan Bimtek BKK berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 210.000,- |
| 3. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan bayar belanja cetak sertifikat kegiatan Bimtek IPK berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 280.000,- |
| 4. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan pembayaran belanja transportasi peserta Bimtek IPK berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 400.000,- |
| 5. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas (Taksi Narasumber pusat) berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 590.000,- |
| 6. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan pembayaran honorarium tim penetapan Upah Minimum Provinsi dan belanja vakasi berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 1.500.000,- |
| 7. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan bayar belanja honor narasumber daerah berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 425.000,- |
| 8. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan bayar belanja transportasi peserta kegiatan pelatihan Soft Skill Instruktur berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 2.850.000,- |
| 9. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan bayar belanja transportasi peserta kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi Metedologi berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 500.000,- |
| 10. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan bayar belanja cetak sertifikat kegiatan pelatihan Soft Skiil Instruktur berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 510.000,- |
| 11. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan bayar belanja cetak sertifikat kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi Metedologi berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 1.020.000,- |
| 12. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan pembayaran penginapan kegiatan pemeriksaan kesehatan kerja berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 3.210.000,- |
| 13. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan pembayaran penginapan kegiatan pengujian lingkungan kerja berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 5.010.000,- |
| 14. | 28 Desember 2017 | Setoran kelebihan pembayaran cetak sertifikat kegiatan Sosalisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 350.000,- |
| 15. | 29 Desember 2017 | Setoran pengembalian belanja perjalanan dinas luar negeri berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 3.201.978,- |
| 16. | 29 Desember 2017 | Setoran pengembalian belanja perjalanan dinas luar daerah berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 360.000,- |
| 17. | 29 Desember 2017 | Setoran kelebihan belanja cetak sertifikat dan cetak kulit laporan kegiatan pelatihan kewirausahaan mandiri berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 1.950.000,- |
| 18. | 29 Desember 2017 | Setoran kelebihan belanja cetak sertifikat dan cetak kulit laporan kegiatan pelatihan motivasi berprestasi bagi usaha produktif berdasarkan hasil temuan inspektorat Tahun 2017 | 2.150.000,- |

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Belanja Brg&Jasa LRA** | **Beban Brg&Jasa LO** | **Selisih +/-** |
| Belanja Bahan Pakai Habis | 2.029.659.583,- | 2.032.492.593,- | (2.833.010,-) |
| Belanja Bahan/Material | 1.427.811.000,- | 1.427.811.000,- | 0,- |
| Belanja Jasa Kantor | 2.216.288.837,- | 2.217.681.453,- | (1.392.616,-) |
| Belanja Premi Asuransi | 37.368.300,- | 39.071.570,50,- | (1.703.270,50) |
| Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 157.142.886,- | 157.142.886,- | 0,- |
| Belanja Cetak dan Penggandaan | 309.164.200,- | 304.840.370,- | 4.323.830,- |
| Belanja Sewa Rumah/Gedung /Gudang /Parkir | 40.805.000,- | 40.805.000,- | 0,- |
| Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 6.350.000,- | 6.350.000,- | 0,- |
| Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 160.850.000,- | 160.850.000,- | 0,- |
| Belanja Makanan dan Minuman | 2.160.331.000,- | 2.160.331.000,- | 0,- |
| Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 186.300.000,- | 186.300.000,- | 0,- |
| Belanja Pakaian Kerja | 305.911.000,- | 305.911.000,- | 0,- |
| Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu | 5.000.000,- | 5.000.000,- | 0,- |
| Belanja Perjalanan Dinas | 3.606.885.870,- | 3.606.885.870,- | 0,- |
| Belanja Pemeliharaan | 333.594.500,- | 333.594.500,- | 0,- |
| Belanja Jasa Konsultansi | 54.772.000,- | 54.772.000,- | 0,- |
| Belanja Hibah Barang atau Jasa | 122.100.000,- | 122.100.000,- | 0,- |
| Belanja Jasa Lembaga | 384.985.523,- | 384.985.523,- | 0,- |
| Honorarium PNS | 1.307.635.000,- | 1.307.635.000,- | 0,- |
| Honorarium Non PNS | 770.503.484,- | 770.503.484,- | 0,- |
| Belanja Kontribusi | 18.000.000,- | 18.000.000,- |  |
| Belanja Jasa Lainnya | 186.767.450,- | 186.767.450,- |  |
| Belanja Vakasi/Verifikasi | 14.100.000,- | 14.100.000,- |  |
| **Jumlah** | **15.842.325.633,-** | **15.843.930.699,50** | **(1.605.066,50)** |

Penjelasan selisih:

* + - Penyesuaian persediaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Penyesuaian Smtr 1** | | **Penyesuaian Smtr 2** | | **Jumlah** | |
| **Debet** | **Kredit** | **Debet** | **Kredit** | **Debet** | **Kredit** |
| **Belanja Bahan Pakai Habis** |  |  |  |  |  |  |
| * Belanja ATK | 1.585.200,- | 0,- | 0,- | 1.451.350,- | 1.585.200,- | 1.451.350,- |
| * Belanja Alat listrik dan elektronik | 1.231.850,- | 0,- | 0,- | 261.750,- | 1.231.850,- | 261.750,- |
| * Belanja peral. Kebersihan dan bahan pembersih | 1.620.760,- | 0,- | 0,- | 219.400,- | 1.620.760,- | 219.400,- |
| * Belanja Peral. / Perlengk.Pkai habis | 63.700,- | 0,- | 264.000,- | 0,- | 327.700,- | 0,- |
| * Belanja bahan dokumentasi / cetakan | 299.470,- | 0,- | 0,- | 4.623.300,- | 299.470,- | 4.623.300,- |
| **Jumlah** | **4.800.980,-** | **0,-** | **264.000,-** | **6.555.800,-** | **5.064.980,-** | **6.555.800,-** |

* + - Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2017 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2017.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Penyesuaian Smtr 1** | | **Penyesuaian Smtr 2** | | **Jumlah** | |
| **Debet** | **Kredit** | **Debet** | **Kredit** | **Debet** | **Kredit** |
| * Belanja Telepon | 0,- | 2.643.418,- | 2.829.710,- | 0,- | 2.829.710,- | 2.643.418,- |
| * Belanja Air | 0,- | 4.507.900,- | 3.565.600,- | 0,- | 3.565.600,- | 4.507.900,- |
| * Belanja Listrik | 0,- | 25.450.141,- | 23.217.035,- | 0,- | 23.217.035,- | 25.450.141,- |
| * Belanja Internet | 0,- | 4.436.300,- | 8.818.030,- | 0,- | 8.818.030,- | 4.436.300,- |
| **Jumlah** | 0,- | **37.037.759,-** | **38.430.375,-** | 0,- | **38.430.375,-** | **37.037.759,-** |

* + - Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Penyesuaian Smtr 1** | | **Penyesuaian Smtr 2** | | **Jumlah** | |
| **Debet** | **Kredit** | **Debet** | **Kredit** | **Debet** | **Kredit** |
| * Belanja Premi Asuransi | 17.187.375,- | 1.142.857,- | 15.465.669,50 | 29.806.917,- | 32.653.044,50 | 30.949.774,- |
| **Jumlah** | **17.187.375,-** | **1.142 .857,-** | **15.465.669,50** | **29.806.917,-** | **32.653.044,50** | **30.949.774,-** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |
| **c. Beban Penyusutan dan Amortisasi** | | **1.315.534.854,11** | **1.025.544.356,21** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2017 dan Tahun 2016. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 1.068.500.434,08 | 768.717.163,40 |
| * Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 247.034.420,03 | 256.827.192,81 |

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris OPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17.

**5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2017** | **2016** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Ekuitas Awal** | **65.220.518.737,81** | **62.247.875.698,83** |
| 1. **Surplus/Defisit LO** | **(36.292.800.429,93)** | **(30.028.936.081,67)** |
| 1. **RK PPKD** | **35.639.760.928,-** | **32.953.780.077,-** |
| 1. **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar** | **(3.219.723.442,95)** | **47.799.043,65** |
| 1. **Ekuitas Akhir** | **61.347.755.792,93** | **65.220.518.737,81** |

**Penjelasannya adalah sebagai berikut:**

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 65.220.518.737,81 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Des 2016.
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (36.292.800.429,93) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2017
3. RK PPKD sebesar Rp. 35.639.760.928,- adalah akun penghubung transaksi OPD dan PPKD tahun 2017 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. (3.219.723.442,95)

Koreksi Tambah

* + - 1. Koreksi Utang Tahun Lalu sebesar Rp. 1.264.321,- yaitu dari utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November dan bulan Desember 2016.
      2. Koreksi mutasi tambah aset tetap sebesar Rp. 486.335.208,33, yaitu penambahan nilai aset disebabkan UU 23 tahun 2014 dan adendum BAST P2D dari kota Padang dan Bukittinggi.
      3. Koreksi mutasi tambah aset tetap sebesar Rp. 713.735.017,71, yaitu hibah dari Kementerian Ketenagakerjaan.
      4. Koreksi kurang nilai akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp. 0,01 yaitu pencatatan koreksi kurang nilai peralatan dan mesin yang merupakan koreksi penyesuaian SIMBADA.

Koreksi Kurang

Koreksi utang tahun lalu sebesar Rp. 741.270,- yaitu koreksi nilai dari penyesuaian hutang air, listrik, telepon dan internet per 31 Desember 2016.

Mutasi kurang Aset Tetap sebesar Rp. 4.340.442.000,- yaitu berupa mutasi tanah kantor ke Dukcapil dan mutasi bangunan kantor UPTD BPPD.

Mutasi kurang Aset Tetap sebesar Rp. 79.874.720,- yaitu adanya belanja modal yang tidak dikapitalisir yaitu berupa gorden senilai Rp. 7.797.000,- dan ragum/alat bengkel senilai Rp. 4.400.000,- dan berupa perkakas bengkel, alat ukur,dll senilai Rp. 49.857.720,- dan gorden (vertikal blen) senilai Rp. 17.820.000,-

1. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 61.347.755.792,93 adalah saldo Ekuitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017.
   1. **Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.**

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2017 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Pendapatan/ Belanja** | **LRA** | **LO** | **Selisih** |
| **Pendapatan Daerah** |  |  |  |
| * Pendapatan Pajak |  |  |  |
| * Pendapatan Retribusi | 461.892.091,- | 465.452.696,68 | (3.560.605,68) |
| * Lain-lain PAD Yg Sah |  |  |  |
| Jumlah Pendapatan | **461.892.091,-** | **465.452.696,68** | **(3.560.605,68)** |
| **Belanja Operasi** |  |  |  |
| * Belanja Pegawai | 19.595.326.386,- | 19.598.787.573,- | (3.461.187,-) |
| * Belanja Brg & Jasa | 15.842.325.633,- | 15.843.930.699,50 | (1.605.066,50) |
| * Belanja Modal | 664.001.000,- | 0,- | 664.001.000,- |
| * Beban Penyusutan & Amortisasi | 0,- | 1.315.534.854,11 | (1.315.534.854,11) |
| * Beban Penyisihan Piutang | 0,- | 0,- | 0,- |
| Jumlah Beban Operasi | **36.101.653.019,-** | **36.758.253.126,61** | **(656.600.107,61)** |

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

**BAB VI**

**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

1. **Kedudukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Sumbar merupakan perangkat Daerah Provinsi Sumbar sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah Provinsi dibidang Ketenaga kerjaan dan Ketransmigrasian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.

1. **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar sebagaimana ditetapkan peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

* Kepala Dinas
* Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan
* Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
  1. Seksi Pelatihan Kerja
  2. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
  3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Produktivitas
* Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan ,terdiri dari :
  1. Seksi Bina Syarat Kerja dan JAMSOS Tenaga Kerja
  2. Seksi Hubungan Industrial dan Kelembagaan
  3. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
* Bidang Transmigrasi , terdiri dari :
  1. Seksi Penyiapan Permukiman Transmigrasi
  2. Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk
  3. Seksi Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi
* Unit Pelaksana Teknis
* Kelompok Jabatan Fungsional

1. **Aspek Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat**

1. Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi provinsi Sumatera Barat sebagai Pelaksana Teknis Dibidang Ketenaga Kerjaan Dan Ketransmigrasian .

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat adalah membantu Gubernur Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bidang Ketenaga Kerjaan Dan Ketransmigrasian.

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Komposisi keadaan Desember 2017 sebanyak 235 orang dan 2 orang PTT (distribusi PNS berdasarkan Kelompok Jabatan, Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan terlampir).

**BAB VII**

**PENUTUP**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih rinci. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan Keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.